



Efisiensi Kembali Bergulir, Sasar Perjalanan Dinas

YOGYA (KR) - Untuk sekian kalinya efisiensi anggaran kembali digulirkan. Kali ini yang menjadi sasaran utama ialah alokasi kegiatan perjalanan dinas. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogya saat ini tengah melakukan pencermatan bersama tim eksekutif.

Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Yogya Sinarbijat Nujanat, menjelaskan tim eksekutif sudah melakukan ekspos terkait rencana efisiensi anggaran pada akhir bulan kemarin. "Setelah libur Lebaran ini kami tindaklanjuti untuk pencermatan kembali. Ada beberapa pos anggaran yang memang harus dilakukan efisiensi," jelasnya,

Kamis (10/4).

Merujuk instruksi Menteri Dalam Negeri maupun hasil evaluasi Gubernur, sektor perjalanan dinas menjadi yang terbesar untuk dipangkas anggaran maupun kegiatannya. Selanjutnya dialihkan melalui refocusing bagi kegiatan lain. Sinarbijat pun tidak menampik, pengurangan anggaran perjalanan dinas mencapai sekitar 50 persen. Selain itu juga menyasar sektor lain seperti pengadaan alat tulis kantor maupun kegiatan seremonial yang digelar di luar kantor.

Sinarbijat menambahkan, upaya efisiensi anggaran tersebut sama sekali bukan untuk me-

nyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini karena program tersebut sepenuhnya diakomodir melalui APBN. Oleh karena itu efisiensi APBD harus betul-betul dimanfaatkan untuk program yang sifatnya strategis. "Sifatnya memang refocusing program mendesak yang menjadi skala prioritas. Sehingga jangan sampai kemudian efisiensi ini tidak memberikan output yang positif. Makanya kami akan mencermati betul ekspos dari tim eksekutif," urainya.

Sementara Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo, mengungkapkan porsi APBD saat ini tidak bisa dialokasikan untuk memba-

ngun infrastruktur berskala besar. Di sisi lain daerah juga jangan sampai terkukung dengan adanya efisiensi. Dirinya justru tengah merespons kondisi ekonomi dampak dari persaingan global setelah Amerika menaikkan tambahan biaya ekspor terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Antisipasi yang harus dilakukan ialah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga perlu ada upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah upaya efisiensi anggaran.

Hasto menjelaskan, salah satu upaya yang tengah disiapkannya ialah melalui program padat karya. Dengan program tersebut masyarakat yang memiliki kendala ekonomi bisa diakomodir untuk mendapatkan tambahan penghasilan. "Saya sudah perintahkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk bisa mengalihkan anggaran ke padat karya. Karena padat karya itu penting untuk mengatasi kondisi ekonomi sekarang," jelasnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005